

# Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang

Oman Sukmana<sup>1\*</sup> 

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur

\* Korespondensi: [oman@umm.ac.id](mailto:oman@umm.ac.id) ; Tel: +62 82244333075

Diterima : 14 Oktober 2020; Direvisi: 11 Desember 2021; Disetujui : 31 Januari 2022

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dan peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas, Malang. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni aktor pemberdaya yang meliputi: Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Tokoh masyarakat, Ketua Rukun Warga, dan Pengurus Karang Taruna —di lingkungan Rukun Warga 18. Teknik pengumpulan data: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Lingkungan sosial merupakan modal sosial; Lingkungan harus dikelola dengan baik untuk kemanfaatan masyarakat; Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan sosial yang harus diselaraskan. Lingkungan Kampung Wolulas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi”. Peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi: Inisiator, Motivator, Koordinator, *Planner*, Fasilitator, dan Komunikator. Dari hasil penelitian ini disarankan agar peran aktor pemberdaya lebih ditingkatkan; Perlu keterlibatan pemerintah dalam pelatihan peningkatan kemampuan aktor pemberdaya; Perlu kerjasama dan partisipasi dari masyarakat.

**Kata kunci:** Literasi Lingkungan; Aktor Pemberdayaan; Pemberdayaan Masyarakat.

**Abstract:** This research aims to identification of the literacy of empowering actors about the social environment and the role of empowering actors in the community-based community empowerment process, in Wolulas Village, Malang. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The research subjects were determined purposively, namely empowering actors which included: manager of family welfare, community leaders, and youth organizations, in citizen organizations 18. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques: process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The conclusion of the research is a description of actor's literacy about the social environment in the process of community empowerment in Wolulas Village which includes the social environment as social capital, the environment must be managed properly for the benefit of the community, the environment consists of the physical and social environment that must be harmonized; and the environment of Kampung Wolulas has the potential to be developed as a “Tourism and Education Village”.. Meanwhile, the roles of actors in the community empowerment process include: Initiator, Motivator, Coordinator, Planner, Facilitator, and Communicator. Furthermore, suggestions and recommendations: in order to increase the role of empowering actors, it is necessary to involve the government in training to increase the capacity of empowering actors, and need for cooperation and participation from the community.

**Keywords:** : Environment Literacy; Empowerment Actors; Community Empowerment.

## 1. Pendahuluan

Salah satu problem sosial di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas merupakan proses yang tepat dalam upaya mengurangi masyarakat miskin. Oleh karena itu maka model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas perlu dikembangkan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling mendasar, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Masyarakat yang dikategorikan miskin karena pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Jayaputra, 2015). Upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pembangunan, khususnya pembangunan berbasis masyarakat.

Konsep yang dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan, konsep literasi lingkungan dan konsep peran aktor pemberdaya. **Pertama**, konsep pemberdayaan. Mengacu kepada pandangan Theresia, dkk., (2014), secara sederhana pengertian konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah merupakan suatu proses pembangunan yang memanfaatkan semua potensi sumberdaya, baik alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai social budaya, dan lain sebagainya, yang direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berbasis masyarakat semestinya suatu proses pembangunan yang berangkat dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan suatu pembangunan yang direncanakan dan diatur oleh "pihak lain" atau oleh elit masyarakat. Suatu pembangunan yang berbasis masyarakat mengandung makna bahwa pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, modal sosial lokal, budaya local, kearifan lokal, dan modal spiritual yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradig baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*.

Menurut pandangan Soleh (2014) tujuan dari pemberdayaan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bertumpu kepada kekuatan atau daya yang mereka miliki sendiri, melalui optimalisasi daya dan peningkatan posisi tawar yang dimiliki masyarakat sendiri. Pemahaman hal tersebut memiliki arti bahwa proses pemberdayaan harus memposisikan kekuatan dan potensi yang ada pada masyarakat sebagai asset utama, sedangkan pihak luar seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak lain yang berkepentingan dipandang sebagai modal pelengkap. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, peran actor pemberdaya sangat penting. Sementara menurut Theresia, dkk. (2014), konsep pemberdayaan masyarakat mengacu kepada dua pengertian, yakni pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam rangka melepaskan diri dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konteks lain suatu pemberdayaan adalah suatu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan orang-orang agar: (1) memiliki akses atas sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Pandangan Zimmerman (2000), proses pemberdayaan dapat dianalisis dalam tiga level, yakni: level individu (*individual*), level organisasi (*organizational*), dan level masyarakat (*community*). Pada level individu, proses pemberdayaan diarahkan kepada aspek: proses belajar dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan (*decision making skills*), kemampuan pengelolaan sumberdaya (*managing resources*), dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain (*working with others*). Pada level organisasi, proses pemberdayaan diarahkan kepada aspek: meningkatkan peluang partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Opportunities to participate in decision-making*), berbagi tanggung jawab (*shared responsibilities*), dan berbagi kepemimpinan (*shared leaderships*). Sedangkan pada level masyarakat (*community*), proses pemberdayaan diarahkan kepada tiga aspek, yaitu: peningkatan kemampuan masyarakat dalam akses terhadap sumberdaya (*acces to resources*), terbukanya struktur pemerintahan (*open government structure*), dan toleransi terhadap keberagaman (*tolerance for diversity*).

Selanjutnya, pemberdayaan juga bisa dimaknai sebagai usaha pengembangan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, marjinal, dan terpinggirkan untuk mengemukakan pandangan, pendapat, dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya. Dalam pandangan tersebut, pemberdayaan memiliki pengertian sebagai perbaikan kualitas kehidupan atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti: (1) perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; (2) perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); (3) kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; (4) terjaminnya keamanan; dan (5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran (Theresia, 2014).

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996), pada saat permulaan gerakan modern, tujuan dari konsep pemberdayaan adalah untuk mencari pilihan berbagai alternative baru dalam proses pembangunan masyarakat. Pada dasarnya, proses pemberdayaan dapat diasumsikan sebagai suatu proses *depowerment* dari sistem kekuasaan yang cenderung mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Doktrin konsep ini memiliki kesamaan dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala model kekuasaan yang berujung hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Begitu juga aliran neo marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menentang industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas apa mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri. Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan (Amalia dan Syawie, 2015: 186).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Dengan demikian pemberdayaan yang dikaitkan dengan kemiskinan dapat disebutkan sebagai upaya untuk merubah keadaan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat miskin dengan mendayagunakan atau menguatkan potensi yang dimiliki individu dan potensi sumber daya lainnya yang terdapat di sekitar lingkungannya. Menurut Mubarak (Sabarisman, 2017) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai proses untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas agar memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Sehingga dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, yang mengharuskan masyarakat berperan aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Perspektif disiplin pekerjaan social (*social work*) kajian tentang pemberdayaan masyarakat termasuk kedalam seting praktik makro (*social work macro practice*). Menurut Netting, Kettner, McMurry, dan Thomas (2017) praktik makro pekerjaan social dimaksudkan sebagai intervensi yang dipandu secara profesional yang dirancang untuk menghasilkan perubahan dalam arena organisasi, komunitas, dan/atau kebijakan. Menurut Kirst-Ashman (2010) terdapat tiga metode utama dalam praktik makro pekerjaan social, yakni: aksi social (*social action*), perencanaan social (*social planning*), dan pemberdayaan komunitas local (*locality community development/empowerment*).

**Kedua**, konsep literasi lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum pengertian Lingkungan hidup, Pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, dan Daya dukung lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup; Selanjutnya Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan Daya dukung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Sukmana, 2003).

Literasi memiliki arti, yaitu kesanggupan atau kemampuan membaca dan menulis (Melani, 2016). Menurut Gumperz (2006) *literacy* adalah kemampuan untuk menghasilkan dan menafsirkan teks tertulis. Secara umum literasi mengacu kepada kemampuan membaca dan menulis secara efektif dalam berbagai konteks. Namun pada abad ke-21 dewasa ini, konsep literasi maknanya mencerminkan kemampuan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola dan mengkomunikasikan informasi (Pilgrim & Martinez, 2017).

Konteks lingkungan, literasi lingkungan berarti kemampuan individu dalam memahami lingkungan. Literasi lingkungan adalah pengetahuan tentang mekanisme kerja lingkungan alami dan peran manusia untuk melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Hubungan yang sangat dinamis antara manusia dan lingkungannya, dapat dilihat dari bagaimana manusia hidup bersama, berdampingan dengan semua komponen di sekitarnya. Suatu perilaku dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan ketika tindakan individu atau kelompok mengadvokasi pemanfaatan sumber daya lingkungan yang memperhatikan aspek berkelanjutan (Meilinda, Prayitno, & Karyanto, 2017).

Dalam memahami pembentuk perilaku ramah lingkungan bisa merunut kepada perspektif teori perilaku berencana (*theory of planned behavior*) (Ajzen, 1991). Menurut *theory of planned behavior*, suatu perilaku (*behavior*) muncul karena adanya tujuan (*intention*), dimana *intention* ini akan ditentukan oleh adanya sikap seseorang atas perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pemahaman kontrol perilaku (*perceived behavior control*). Oleh karena itu terbentuknya perilaku ramah lingkungan pada seseorang akan ditentukan oleh sikap perilaku, norma subjektif, dan pemahaman kontrol atas perilaku akan mempengaruhi tujuan (minat), dan selanjutnya akan membentuk perilaku yang positif terhadap lingkungan.

Literasi lingkungan salah satunya dapat diukur dengan menggunakan instrumen literasi lingkungan menurut Hesham dan NEP (Meilinda, Prayitno, & Karyanto, 2017), yang meliputi 3 dimensi yakni: pengetahuan lingkungan, sikap, dan kepedulian terhadap lingkungan.

**Tabel 1:** Aspek Literasi Lingkungan

No.	Dimensi	Aspek
1.	Pengetahuan (knowledge) (McBride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013) (NAAEE, 2011) (Ramdasa & Mohameda, 2014)	a. Pengetahuan ekologis b. Pengetahuan politik Sosio c. Pengetahuan tentang Masalah Lingkungan
2.	Sikap (attitude) (Dunlap, Liere, Mertig, & Jones, 2000) (Erdogan & Marcinkowski, 2015) (Ajzen I., 2001)	a. Kepekaan lingkungan: (1) Sikap ramah dan perhatian terhadap lingkungan. (2) Berpartisipasi aktif dalam mengarahkan penyelesaian dan pemecahan masalah lingkungan.

Oman Sukmana

Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulus, Malang

- (3) Menerapkan sikap perhatian dalam gaya hidup sehari-hari.
  - (4) Mengimplementasi regulasi lingkungan.
- b. Motivasi dan niat untuk berperan serta secara aktif dalam perlindungan dan peningkatan lingkungan:
- (1) berpartisipasi aktif terhadap peningkatan dan perlindungan lingkungan.
  - (2) kepercayaan untuk membuat keputusan dan menilai masalah lingkungan
3. Perhatian (concern)  
(Hesham & Dajeh, 2011)  
(McBride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013)
- a. Respon terhadap masalah lingkungan:
    - (1) menggambarkan dan menyajikan fakta tentang masalah lingkungan.
    - (2) menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap masalah lingkungan.
    - (3) Mampu membedakan jenis-jenis masalah lingkungan

---

Sumber: Meilinda, Prayitno, & Karyanto. 2017.

**Ketiga**, konsep tentang aktor pemberdaya. Secara umum istilah aktor mengacu kepada dua hal, yakni: (1) pria yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, atau film; dan (2) orang yang berperan dalam suatu kejadian penting. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, aktor berarti orang yang berperan dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat atau sering disebut juga agen perubahan masyarakat. Mengacu kepada pandangan Lunenburg (2010), agen perubahan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam merangsang, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan suatu tujuan perubahan (*“is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort”*). Selanjutnya Lunenburg menyatakan bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya perubahan.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, agen perubahan (*change agent system*) adalah seorang individu yang melakukan inisiatif dalam proses perubahan makro (macro change process), yakni perubahan pada lembaga/organisasi atau sistem komunitas (Kirst-Ashman & Hull, 2006). Selanjutnya disebutkan bahwa peran dari agen perubahan dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliputi: (1) *Enabler* (pemungkin), (2) *Mediator*, (3) *Coordinator*, (4) *General Manager*, (5) *Educator*, (6) *Evaluator*, (7) *Broker*, (8) *Facilitator*, (9) *Initiator*, (10) *Negotiator*, (11) *Mobilizer*, dan (12) *Advocate*. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, aktor pemberdayaan disebut juga sebagai kader pemberdayaan. Menurut Ghazali (2015) dalam perspektif organisasi, konsep “kader” mengacu kepada orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen serta dedikasi yang kuat untuk menggerakkan organisasi dalam mewujudkan visi misinya. Sementara dalam perspektif desa, muncul istilah “kader desa”, yakni orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa untuk bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. “kader desa” adalah mereka yang berperan aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Kader-kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya baik sebagai kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader desa dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar,

mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak. Kader desa mengemban amanat untuk melakukan pengorganisasian pembangunan desa bidang (1) infrastruktur, (2) sarana dan prasarana kesehatan, (3) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, (4) sarana dan prasarana ekonomi, dan (5) lingkungan hidup.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan RW 18, Kelurahan Turen, Kabupaten Malang, melalui program pengelolaan lingkungan yang diberi nama Kampung Wolulas sebagai Kampung Wisata dan Edukasi. Program Kampung Wolulas sebagai Kampung Wisata dan Edukasi berbasis potensi modal sosial dan modal lingkungan lokal yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dan peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada masyarakat Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan: Bagaimanakah literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas?; dan Bagaimana peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas?. Berdasarakan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang bentuk literasi aktor tentang lingkungan sosial dan peran aktor pemberdaya dalam program pemberdayaan berbasis komunitas di Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif (Denzim dan Lincoln, 2009). Penelitian ini dilakukan di Kampung Wolulas, Kecamatan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Penentuan informan penelitian secara *purposive or judgemental sampling* (Babbie, 2008:204; Neuman, 2007), dimana teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi ketika seorang pakar (peneliti) menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka informan dalam penelitian ini adalah: Ketua RW 18, Ketua dan anggota PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat di wilayah Kampung Wolulas.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Nopember 2019, dimulai dari proses penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan (luaran) penelitian. Dalam proses pengumpulan data, digunakan tiga teknik yang saling melengkapi, yakni: wawancara, pengamatan, dan dokumentation. Oleh karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka untuk menganalisisnya digunakan pendekatan interpretif (*interpretive approach*) (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data merupakan suatu proses atau prosedur (Helaluddin & Wijaya, 2019). Tahapan proses atau prosedur analisa data dalam penelitian ini mengacu kepada pandangan Babbie (2008), yang meliputi: (1) Proses *Coding*, yaitu proses melakukan klasifikasi dan kategorisasi data, yang meliputi: *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Menurut Kalof, Dan, dan Dietz (2008), *coding* adalah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data, yakni melakukan pemetaan data ke dalam seperangkat kategori-kategori dimana peneliti akan menjadikannya sebagai teks kesimpulan dan pernyataan teoritik; (2) Proses *Memoing*, yaitu proses menulis memo atau catatan untuk diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam proyek (*writing memos or notes to yourself and others involved in the project*). Strauss dan Corbin (Babbie, 2008) menyatakan bahwa proses *memoing* meliputi tiga jenis, yakni: *Code Notes*, *Theoretical Notes*, dan *Operational Notes*; dan (3) Proses *Concept Mapping*, yaitu proses pemetaan relasi antar berbagai konsep. Pemetaan ini bisa berupa: alur, diagram, tabel, grafik, dan sebagainya.

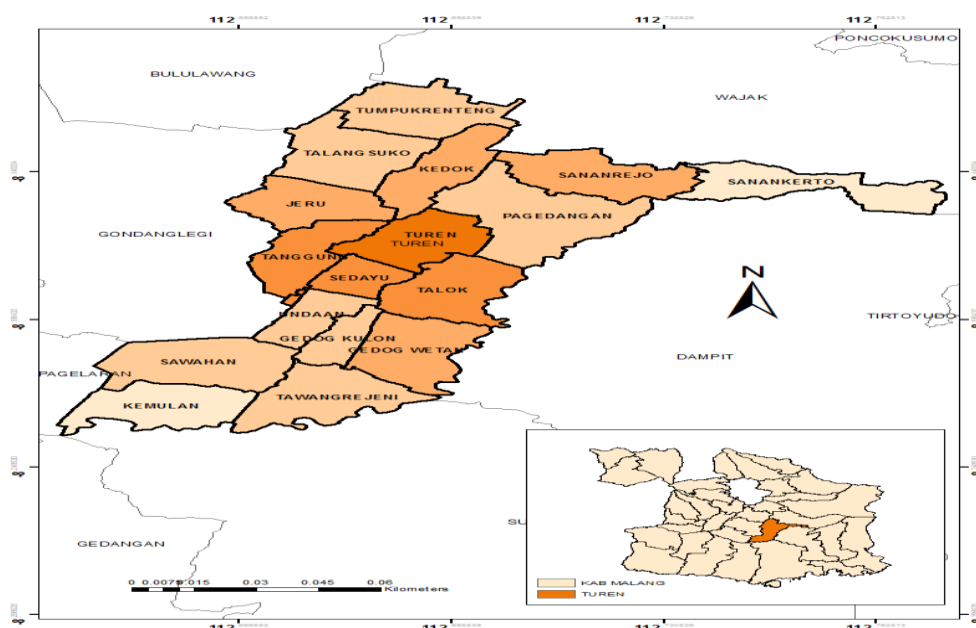
Pada memberikan jaminan keabsahan data, peneliti menggunakan uji keabsahan yang memfokuskan pada kriteria kredibilitas (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2006). Teknik uji kredibilitas (*credibility*) yang digunakan meliputi: (1) perpanjangan keikutsertaan; (2) ketekunan pengamatan; (3) triangulasi; dan (4) kecukupan referensial. Sementara teknik uji kepastian (*confirmability*) menggunakan teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran.

### 3. Hasil

#### 3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Turen merupakan salah satu kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Turen Malang terletak diantara 112,3953 sampai 122,4477 Bujur Timur dan 8,0773 sampai 8,1353 Lintang Selatan. Berdasarkan data potensi Kecamatan Turen, posisi letak geografi seluruh desa yang ada di Kecamatan Turen termasuk secara topografi tergolong kawasan dataran. Wilayah Kecamatan Turen secara keseluruhan memiliki luas sekitar 63,90 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,15 persen dari total luas wilayah Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi seluruh wilayahnya dataran, maka menjadikan wilayah Kecamatan Turen sebagai jalur transit yang menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kabupaten Lumajang.

Gambar 1: Peta Wilayah Kelurahan Turen



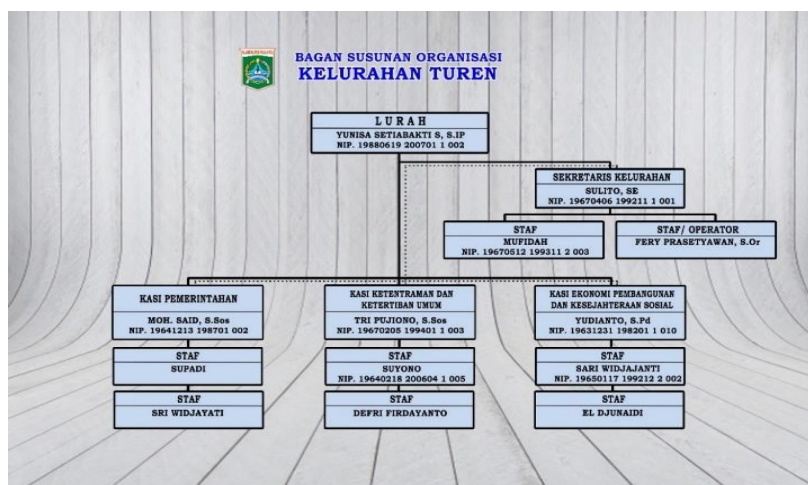
Sumber: Data Kelurahan Turen, 2019

Kecamatan Turen memiliki potensi wisata yang bisa dikunjungi. Selama berada di Kecamatan Turen, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti akomodasi, wisata alam hingga makanan khas kecamatan ini. Namun demikian kekayaan alam yang dimiliki kecamatan Turen hingga saat ini masih belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Turen memiliki peluang untuk ditingkatkan, jika mampu memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya. Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Turen adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Wajak, Bululawang; Sebelah Timur, Kabupaten Dampit; Sebelah Selatan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Sumbermanjing; dan Sebelah Barat, Kecamatan Gondanglegi (Harmoko, 2018).

Lokasi penelitian ini difokuskan pada komunitas di Rukun Warga (RW) 18, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kelurahan Turen terdiri dari 1 Dusun, 21 Rukun Warga (RW), dan 97 Rukun Tetangga (RT). Rukun Warga (RW) 18, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang memiliki 5 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk RW 18, Kelurahan Turen sebanyak 450 jiwa yang terdiri dari 250 Kepala Keluarga (KK).

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Turen, Kecamatan Turen dapat dilihat dalam bagan 1 sebagai berikut:

**Bagan 1:** Struktur Organisasi Kelurahan Turen



Sumber: Data Kelurahan Turen, 2019

Lingkungan RW 18, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dikembangkan dan dikelola sebagai Kampung Wisata dan Edukasi. Pengelola RW 18 dipimpin oleh seorang Ketua RW, yakni ibu Hj. Tasminah, S.Pd., M.Pd., yang dibantu oleh 2 orang sekretaris, yakni Tutik Setyorini dan M. Arif Rahman Hakim, sedangkan bendahara dijabat oleh Sri Rahayuningtyastuti dan Endang Sri Hartiningsih, S.Pd. Selain itu Ketua RW juga dibantu oleh 2 orang Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua I Bidang Lingkungan yang dijabat oleh bapak H. Hariono dan Wakil Ketua II Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dijabat oleh bapak Sukriyanto.

### 3.2. Literasi Aktor tentang Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Wolulus, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Pertama**, aktor pemberdaya memiliki pemahaman bahwa lingkungan sebagai modal sosial. Menurut informan penelitian, yakni tokoh masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat Kampung Wolulus, RW 18, Kelurahan Turen yang menjadi subjek penelitian ini, menyatakan bahwa hal yang penting untuk disadari oleh masyarakat adalah bahwa lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial merupakan modal sosial bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setiap masyarakat atau komunitas memiliki sumber dan potensi lingkungan sebagai modal sosial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu tokoh masyarakat berikut:

“...masyarakat harus sadar bahwa lingkungan baik itu namanya berupa lingkungan fisik maupun sosial memiliki potensi sebagai modal, baik itu modal secara fisik maupun sosial yang dapat dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas...” (AS, 18/05/2019).

Secara konsepsi, modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas yang berkaitan dengan proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan social trust, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada umumnya, modal sosial mengacu kepada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of sosial trust*), norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Berbagai masalah social yang ada di masyarakat, tidak mungkin akan mampu diatasi secara sendiri-sendiri oleh individu, oleh karena itu diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi



masalah sosial tersebut. Modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain.

**Kedua**, aktor pemberdaya memiliki pemahaman bahwa lingkungan harus dikelola dengan baik. Salah satu informan penelitian menyatakan bahwa sebagai modal sosial yang potensial maka lingkungan harus dikelola dan ditata dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...menurut saya lingkungan itu harus dimanfaatkan dan dikelola bagi kepentingan masyarakat, karena potensi dalam lingkungan itu merupakan modal yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat...ya lingkungan itu kan ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosialnya. Pokoknya manusia jangan merusak lingkungan tetapi menjaganya...” (NH, 18/05/2019).

Menurut NH, lingkungan sebagai modal sosial mengandung makna bahwa lingkungan harus dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika lingkungan dijaga dan dikelola dengan baik, maka kehidupan manusia juga akan dijaga oleh lingkungan. Pada dasarnya lingkungan sosial merupakan bagian dari lingkungan hidup, dimana lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan norma, dan terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan (buatan). Pengelolaan Lingkungan Sosial diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan), dan evaluasi yang bersifat komunikatif, dengan mempertimbangkan ketahanan sosial, keadaan ekosistem, tata ruang, kualitas sosial setempat, sumberdaya sosial (potensi dan keterbatasan), dan kesesuaian dengan asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

Fokus dari proses pengelolaan lingkungan diarahkan untuk: (1) tercapainya keselarasan, keserasian, serta keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (2) terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup; (3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (5) terkendalinya pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bijaksana; dan (6) terlindunginya lingkungan sari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Ketiga**, aktor pemberdaya memiliki pemahaman bahwa terdapatnya korelasi yang saling timbal balik antara manusia dan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Menurut informan penelitian, bahwa lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, dimana manusia mencari makan, minum dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena didalamnya lingkungan itu terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling bergantung. Tokoh masyarakat menuturkan:

“...seperti yang sudah saya katakana tadi bahwa lingkungan itu harus dikelola dengan baik, yak karena terdapat hubungan yang erat dan saling timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Manusia kan membutuhkan lingkungan, kita butuh udara, air, dan sebagainya. Demikian pula kita butuh bantuan orang lain, karena manusia tidak bias hidup sendirian, dia harus bermasyarakat...” (NH, 18/05/2019).

Apabila kondisi lingkungan hidup tidak dijaga dan dipelihara maka akan mengakibatkan munculnya berbagai bencana bagi penghuninya, khususnya bagi manusia. Sebagai contoh, misalnya bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya, terjadi sebagai akibat lingkungan hidup yang tidak terpelihara. Selain bencana alam, berbagai wabah penyakit juga sering timbul melanda lingkungan hidup yang tidak terpelihara. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengatasi batas hambatan yang ditimbulkan alam, tetapi kenyataannya masalah dan kerusakan lingkungan sulit dihindari sehingga mengganggu dan mengancam keberadaan manusia dan habitat penghuninya. Hal itu dikemukakan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...ya akibatnya kalau manusia tidak ada kepedulian atau perilakunya merusak lingkungan akan terjadi bencana apa itu longsor, banjir, dan sebagainya. Fungsi dan manfaat lingkungan itu kan banyak contohnya untuk tempat hidup, sumber mencari kekayaan, kalau lingkungan sosialnya ya tempat kita bersosial, berbudaya, dan seterusnya...” (AS, 18/05/2019).

Pemahaman subyek penelitian tentang lingkungan hidup yakni bahwa lingkungan hidup merupakan tempat atau pusat kehidupan manusia, dimana keberadaan lingkungan hidup telah banyak memberikan banyak manfaat dan fungsi bagi kehidupan manusia, seperti: (1) Sebagai tempat untuk bertahan hidup; (2) Sebagai tempat untuk bersosialisasi; (3) Sebagai tempat untuk mencari kekayaan; (4) Tempat untuk mendapatkan hiburan; (5) Sebagai sarana edukasi; dan (6) Sebagai sumber kebudayaan.

Dalam konteks lingkungan social, maka kondisi lingkungan social yang baik dan positif dimana relasi sosial antar orang-orang anggotanya berjalan secara harmonis maka akan mendukung terbentuknya perilaku social yang baik dan positif di antara warganya. Demikian pula sebaliknya, perilaku positif dari orang-orang warga suatu komunitas akan berkontribusi positif bagi penciptaan lingkungan social yang baik.

**Keempat**, konteks lingkungan dapat dilihat dari dua aspek, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Aktor pemberdaya memahami bahwa lingkungan itu meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kecerahan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya lingkungan itu terdiri dari tiga unsur, yakni: (1) Unsur Hayati (Biotik), yaitu unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya; (2) Unsur fisik (abiotik), yaitu segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya; dan (3) Unsur Sosial Budaya, yaitu unsur lingkungan yang diciptakan oleh manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Ketiga unsur tersebut diatas keberadaannya saling memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya saja keberadaan unsur fisik seperti air dan udara merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup.

**Kelima**, aktor pemberdaya berpandangan bahwa lingkungan fisik dan social lingkungan Kampung Wolulas memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurut para tokoh masyarakat RW 18, bahwa lingkungan Kampung Wolulas, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi” karena: (1) Memiliki aliran sungai yang bisa dikembangkan menjadi wisata sungai; (2) Potensi sebagai kampung edukasi Bahasa Inggris dan Jepang; (3) Potensi sebagai kampung wisata kuliner (pengembangan produk makanan olahan); dan (4) berada pada lokasi strategis di jalur wisata pantai Malang Selatan dan wisata “Masjid Jin” yang ada di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen. Terkait hal itu disampaikan oleh ketua RW 18 berikut:

“...Alhamdulillah, lingkungan kami ini memiliki beberapa potensi yang bisa kami kembangkan dan kelola untuk kemanfaatan masyarakat. Ya potensi-potensi itu seperti disini ada saluran irigasi dari sungai, kemudian bisa dikembangkan menjadi kampung wisata kuliner karena wilayah RW 18 ini kan dilalui jalur menuju lokasi wisata Malang Selatan...” (TM, 18/05/2019).

Sejalan penjelasan tersebut Kepala Kampung Wolulas menuturkan:

“...iya seperti yang disampaikan ibu RW, disini juga bias dikembangkan menjadi kampung edukasi Bahasa Inggris dan Jepang seperti yang sudah dikembangkan di daeran Pare, Kediri...” (ST, 18/05/2019).

Data hasil penelitian tersebut jika dianalisis dari perpektif literasi lingkungan sebagaimana dikemukakan dalam bagian pendahuluan, dapat dikatakan bahwa literasi aktor tentang lingkungan

sudah memenuhi tiga dimensi, yakni: dimensi pengetahuan tentang lingkungan, dimensi sikap terhadap lingkungan, dan dimensi sikap terhadap lingkungan.

**Tabel 2:** Ringkasan literasi aktor tentang lingkungan sosial

No.	Dimensi	Literasi Aktor
1.	Pengetahuan ( <i>knowledge</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya korelasi yang saling timbal lingkungan.</li> <li>• Konteks lingkungan dapat dilihat lingkungan fisik dan lingkungan sosial.</li> </ul>
2.	Sikap ( <i>attitude</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan sosial sebagai modal sosial.</li> </ul>
3.	Perhatian ( <i>concern</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan harus dikelola dengan baik.</li> <li>• Potensi Lingkungan fisik dan social lingkungan Kampung Wolulas.</li> </ul>

### 3.3. Peran Aktor dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Peran-peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen dapat dideskripsikan sebagai berikut: **Pertama**, Peran sebagai inisiator. Aktor pemberdaya berperan sebagai inisiator yang melakukan prakarsa dan inisiatif awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Inisiator pemberdayaan masyarakat berupaya untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat (komunitas) guna melakukan tindakan perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal tersebut terlihat dari penuturan Kepala Kampung Wolulas: *"...awalnya saya dan ibu RW serta beberapa tokoh masyarakat berdiskusi bagaimana agar lingkungan Kampung Wolulas ini dijadikan sebagai kampus wisata edukasi, akhirnya kami menginiasi suatu program yakni kampung wsiata edukasi..."* (ST, 27/05/2019).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, inisiator pemberdayaan masyarakat bias berupa: pihak pemerintah, dimana sebagai inisiator pemerintah akan memberikan stimulant kepada masyarakat melalui berbagai program yang diselenggarakan; pihak swasta/LSM, sebagai inisiator pelaksana pemberdayaa masyarakat untuk memajukan kepentingan masyarakat umum; dan pihak masyarakat, dimana upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya diprakarsai oleh para pemangku kepentingan seperti kades, lurah, ketua RT, ketua RW dan sebagainya.

**Kedua**, peran sebagai motivator. Menurut informan salah satu peran yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Hal itu seperti dikemukakan Ketua RW 18 berikut:

*"...saya sebagai ketua RW berusaha mengajak masyarakat untuk bangkit, memiliki semangat dan motivasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui program bersama yakni pengembangan kampung Wolulas sebagai kampung wisata edukasi, mengajak masyarakat untuk terlibat berpartisipasi..."* (TM, 18/05/2019).

Motivator adalah orang yang mendorong tumbuhnya motivasi kepada pihak lain. Pengertian motivator meliputi dua arti, yakni orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak; dan petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada calon akseptor keluarga berencana.

**Ketiga**, peran sebagai koordinator. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, aktor pemberdaya harus melakukan kegiatan koordinasi baik internal dengan masyarakat maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah, dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

*"...dalam pelaksanaan program di masyarakat saya harus melakukan koordinasi dengan semua lapisan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan pihak laiinya agar program ini*

bias berjalan dan mendapat dukungan semua pihak. Memang tidak mudah dalam melaksanakan koordinasi ini karena seringkali ditemukan respons yang kurang mendukung..." (AS, 18/05/2019).

Makna koordinator adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk suatu *scope* permasalahan dan mengkoordinasi orang, seperti koordinator tim. Koordinator (coordination) artinya menghubungkan (penghubung), jadi peran koordinator itu adalah orang yang menghubungkan yang dalam artian organisasi koordinator itu berperan dalam mengatur suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Keempat**, Peran sebagai perencana (*planner*). Aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan juga berperan sebagai perencana, dimana mereka harus membuat rencana dan merancang program-program pemberdayaan yang akan dilakukan. Kegiatan perencanaan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam menyusun program dan menentukan target yang akan dicapai, serta menentukan berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Tokoh masyarakat menjelaskan berikut:

"...ya selain peran-peran seperti yang sudah saya katakan tadi, kami juga kadang harus menyusun rencana program pemberdayaan yang akan dirapatkan dan diputuskan dengan pengurus RW dan warga masyarakat...ya kami ini melakukan kegiatan secara keseluruhan, mulai dari merencanakan hingga melaksanakan..." (AS, 18/05/2019).

**Kelima**, peran sebagai fasilitator. Actor pemberdaya juga melaksanakan fungsi dan peran sebagai fasilitator. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

"...memang seperti yang sudah dijelaskan oleh pak Asyari itu betul seperti itu adanya, cuman saya menambahkan saja bahwa kami ini bertindak juga dalam memfasilitasi masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat kita tampung, jadi istilahnya kami ini fasilitator begitu. Selain itu kami juga harus menjalin komunikasi dan relasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah agar program kami bisa berjalan sesuai yang diharapkan ..." (NH, 18/05/2019).

Fasilitator pemberdayaan mengacu kepada pengertian orang yang memudahkan masyarakat untuk membangun proses diskusi dan dialog diantara mereka untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Fasilitator bisa juga orang yang mendampingi atau memfasilitasi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, merubah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Sebagai agen pemberdayaan, seorang fasilitator melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi, pelatihan (*training*), melaksanakan kegiatan-kegiatan umum pemberdayaan masyarakat, memperkenalkan berbagai inovasi sederhana.

**Keenam**, peran sebagai komunikator. Dari pernyataan hasil wawancara dengan informan, sebagaimana dikemukakan, dapat disebutkan bahwa salah satu peran aktor adalah sebagai komunikator. Dalam proses pemberdayaan, seorang agen pemberdaya adalah merupakan komunikator, yang bertugas memelopori, menggerakkan dan menyebarluaskan program-program pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

**Tabel 3:** Bentuk peran aktor dalam pemberdayaan masyarakat

No.	Bentuk peran	Deskripsi peran
1.	Inisiator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan sebagai pemrakarsa dan inisiator proses pemberdayaan.</li> </ul>
2.	Motivator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan sebagai motivator yang mendorong motivasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya.</li> </ul>
3.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan dalam mengkoordinir seluruh aktivitas proses pemberdayaan.</li> </ul>
4.	Perencana ( <i>Planner</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktor berperan sebagai perencana dalam merancang program pemberdayaan.</li> </ul>

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 5. | Fasilitator | • Aktor berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam proses pemberdayaan.             |
| 6. | Komunikator | • Aktor berperan sebagai komunikator, yang mengomunikasikan program pemberdayaan kepada masyarakat dan berbagai stakeholder. |
- 

#### 4. Pembahasan

Dari hasil penelitian, ada dua bahasan utama, yaitu: bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan; dan, bentuk peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan berbasis komunitas. **Pertama**, bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada diri aktor pemberdaya sudah terbentuk literasi lingkungan. Mengacu kepada rumusan Hesham dan NEP (Meilinda, Prayitno, & Karyanto, 2017), aspek dari literasi lingkungan pada aktor pemberdaya ditandai dengan dimilikinya dimensi pengetahuan lingkungan, sikap terhadap lingkungan, dan perhatian atas lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini, aka dapat ditambahkan terkait literasi lingkungan yang meliputi dimensi perilaku terhadap lingkungan, yakni bagaimana bentuk perilaku aktor atas lingkungannya. Dengan demikian, literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan selain melibatkan aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan perhatian, juga berkaitan dengan respon berupa perilaku atas lingkungan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa literasi lingkungan adalah merupakan keterampilan dasar, pemahaman dan perasaan tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Keterampilan dan pemahaman dasar tentang lingkungan pada aktor pemberdaya merupakan aspek penting untuk memunculkan perilaku ramah lingkungan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya jika mengacu kepada perspektif *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa perilaku manusia itu terbentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai, sementara aspek tujuan itu dibentuk oleh tiga hal, yakni: sikap terhadap lingkungan, norma subjektif, dan pemahaman kontrol tingkahlaku.

**Kedua**, bentuk peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pada hakekatnya adalah proses pemberdayaan yang melibatkan dan memanfaatkan potensi lingkungan komunitas baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Peran aktor pemberdaya sangat menentukan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas karena mereka secara proaktif melakukan kegiatan inisiasi, membangkitkan motivasi, malakukan koordinasi, menyusun perencanaan, melaksanakan fasilitasi, dan membangun komuniasi dan relasi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor dalam pemberdayaan masyarakat, cukup signifikan. Peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen meliputi peran sebagai: inisiator, motivator, koordinator, perencana (*planner*), fasilitator, dan komunikator. Mengacu kepada peran-peran pekerja sosial dalam pratik makro sebagaimana dikemukakan oleh Kirst-Ashman & Hull (2006), maka bentuk peran aktor pemberdaya sebagai agen perubahan (aktor pemberdaya) dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, memiliki kesamaan dengan peran pekerja sosial dalam proses intervensi makro yakni sebagai: *enabler* (pemungkin), *mediator*, *coordinator*, *general manager*, *educator*, *evaluator*, *broker*, *facilitator*, *initiator*, *negotiator*, *mobilizer*, dan *advocate*.

Peran aktor pemberdaya sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Beberapa kasus kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya dikarenakan tidak optimalnya peran aktor atau fasilitator. Misalnya, hasil studi Muslim (2017) menyebutkan bahwa kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin diakibatkan oleh tidak optimalnya peran, tugas, dan fungsi fasilitator sebagai aktor pemberdaya.

## 5. Kesimpulan

Bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat di kampung Wolulas yang meliputi: (1) Lingkungan sosial sebagai modal sosial; (2) Lingkungan harus dikelola dengan baik untuk kemanfaatan warga; (3) Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan; (4) Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan sosial; dan (5) Lingkungan Kampung Wolulas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai “Kampung Wisata dan Edukasi” karena: (a) Memiliki aliran sungai yang bisa dikembangkan menjadi wisata sungai; (b) Potensi sebagai kampung edukasi Bahasa Inggris dan Jepang; (c) Potensi sebagai kampung wisata kuliner (pengembangan produk makanan olahan); dan (d) berada pada lokasi strategis di jalur wisata pantai Malang Selatan dan wisata “Masjid Jin” di Turen.

Sedangkan peran aktor pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi peran sebagai: (1) Melakukan inisiasi (inisiator), (2) Memberikan motivasi (motivator), (3) Melakukan koordinasi (coordinator), (4) Membuat perencanaan (planner), (5) Melaksanakan fasilitasi (Fasilitator), dan (6) Melakukan komunikasi dan relasi (komunikator).

## 6. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terdapat beberapa saran: **Pertama**, mengingat peran aktor (agen) pemberdaya sangat urgen dalam proses pemberdayaan masyarakat maka peran aktor (agen) untuk terus ditingkatkan dan berkesinambungan terutama peran sebagai inisiator dan motivator masyarakat; **Kedua**, pihak pemerintah perlu melakukan program pelatihan peningkatan kapasitas bagi para aktor (agen) pemberdaya baik di tingkat desa, kelurahan, maupun komunitas, agar peran mereka bisa optimal sebagai mitra pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat; **Ketiga** bagi masyarakat, untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) aktif dengan aktor (agen) pemberdaya dalam proses pemberdayaan masyarakat serta memberikan respon yang positif kepada aktor (agen) pemberdaya masyarakat.

**Ucapan terimakasih:** Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah membiayai program penelitian ini melalui dana Blokgrant Fakultas tahun 2019.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Tehory of Planned Behavior. Organizational Bevaior and Human Decision Processes*. University of Massachusetts at Amherst : Academic Press, Inc.
- Amalia, A.D.; & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015. Pp 175-188*.
- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Denzin, N.K.; & Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Netting, F.E.; Kettner, P. M.; McMurtry, S.L.; & Thomas, M.L. (2017). *Social Work Macro Practice*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Ghozali, D. A. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indpnesia.
- Gumperz, J. C. (ed.). (2006). *The Social Construction of Literacy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harmoko. (2018). *Kecamatan Turen Dalam Angka 2018*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Helaluddin; & Wiaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives- Vision, Analysis and Practice*.

- Jayaputra, A. (ed.). (2015). *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial bagi Peserta Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Pusltbangkesos Kemensos RI.
- Kalof, L.; Dan, A.; & Dietz, T. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kirst-Ashman, K.K. (2010). *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives*. Belmont: Brooks/Cole.
- Kirst-Ashman, K.; & Hull, G.H. (2006). *Generalist Practice With Organizations and Communities*. Belmont, USA: Thomson Higher Education.
- Lunenburgm, F. C. (2010), *Managing Change: The Role Of The Change Agent*, *International Journal of Management, Business, and Administration*, Volume 13, Number 1, 2010.
- Marvasti, A.B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Melani, S. (2016). Literasi informasi dalam praktek sosial. *Jurnal Iqra'* Volume 10 No.02, Oktober 2016 (pp. 67-82).
- Meilinda, H.; Prayitno, B.A.; & Karyanto, P. (2017). *Student's Environmental Literacy Profile of Adiwiyata Green School in Surakarta, Indonesia*. *Journal of Education and Learning*. Vol. 11 (3) pp. 299-306.
- Muslim, A.(2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin: Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, Vol 13, No. 1, Maret 2017.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Pilgrim, J; & Martinez, E.E. (2017). *Defining Literacy in the 21<sup>st</sup> Century: A Guide to Terminology and Skills*. *Texas journal of literacy education*. volume 1 issue 1.
- Pranarka dan Vidhyandika. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Purba, J. (2002). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. *Sosio Informa* Vol. 3, No. 03, September - Desember, Tahun 2017. pp 216-235.
- Salim, A. (peny.). (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarwono, S.W. (1995). *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sukmana, O. (2003). *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: Bayu Media.
- Suradi. (2019). Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang. *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 03, Mei-Agustus, Tahun 2019.
- Theresia, A. dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akedemisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Zimmerman, M.A. (2000). *Handbook of Community Psychology*, edited by Julian Rappaport and Edward Seidman. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

